



# Hemat Rp4 Miliar Setahun

## ■ Wali Kota Yogya Klaim Plafonisasi BBM Kendaraan Dinas Bisa Menghemat Anggaran

**YOGYA, TRIBUN** Efisiensi anggaran belanja daerah di tempuh Pemkot Yogyakarta melalui kebijakan plafonisasi bahan bakar minyak (BBM) bagi kendaraan operasional dinas. Dengan adanya plafonisasi BBM, mobil dinas di lingkungan Pemkot Yogyakarta hanya dijatah bensin 5 liter per hari, kemudian sepeda motor 1 liter. Kebijakan ini salah satunya untuk mengantisipasi banyaknya kendaraan dinas yang dibawa pulang ke rumah para pejabat di luar Kota Yogyakarta, namun kebutuhan BBM-nya tetap ditanggung APBD. Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, menandakan, melalui skema tersebut, pemerintah daerah diproyeksikan mampu menekan biaya transportasi dengan angka yang cukup signifikan.

"Kalau kami hitung dalam setahun, efisiensinya bisa mencapai kurang lebih Rp4 miliar untuk biaya transportasi. Itu dengan cara plafonisasi (BBM) tersebut," ujarnya, Jumat (17/4).

Hasto mengungkapkan, kebijakan ini diambil sebagai langkah lanjutan dari evaluasi penggunaan kendaraan dinas dan pola kerja pegawai Balai Kota. Menurutnya, pengurangan beban BBM tidak bisa sekadar mengandalkan program *work from home* (WFH) sekali dalam satu pekan.

Terlebih, berdasarkan hasil evaluasi, dari total 7.115 karyawan di lingkungan Pemkot Yogyakarta, hanya 201 orang atau sekitar 2,8 persen yang mengambil opsi WFH pada Jumat. Selain jumlahnya yang kecil, sebagian pegawai yang memilih WFH adalah staf yang sehari-harinya memang tidak dibekali fasilitas kendaraan plat merah.

Lebih lanjut, mantan Bupati Kulon Progo ini mengaku enggan mengeluarkan instruksi yang bersifat *top-down* soal gerakan jalan kaki atau bersepeda bagi

### PROGRAM EFISIENSI

- Efisiensi anggaran belanja daerah di tempuh Pemkot Yogyakarta melalui kebijakan plafonisasi bahan bakar minyak (BBM) bagi kendaraan operasional dinas.
- Dengan adanya plafonisasi BBM, mobil dinas di lingkungan Pemkot Yogyakarta hanya dijatah bensin 5 liter per hari, kemudian sepeda motor 1 liter.
- Kebijakan ini salah satunya untuk mengantisipasi banyaknya kendaraan dinas yang dibawa pulang ke rumah para pejabat di luar kota, namun kebutuhan BBM-nya tetap ditanggung APBD.

pegawai. Untuk upaya penghematan BBM, Hasto pun lebih memilih membangun kesadaran personal, sehingga tidak muncul budaya "Asal Bapak Senang" atau ABS.

"Saya inginnya kesadaran. Kalau diperintah, nanti awalnya banyak tapi lama-lama mereteli (berkurang). Saya tidak ingin nanti di depan Wali Kota gayanya *ngortel* (bersepeda), tapi mobilnya dititipkan di seberang jalan," katanya.

Di sisi lain, berdasarkan pantauan *Tribun Jogja*, Jumat, pelayanan publik tetap berjalan normal di tengah program WFH ini. Deretan pos layanan yang disajikan Mal Pelayanan Publik (MPP) di kompleks Balai Kota Yogyakarta tetap beroperasi normal tanpa kendala berarti. Misalnya, di area layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), para petugas tampak sigap di depan layar komputer melayani administrasi warga terkait perekaman KTP elektronik.

Hasto mengaku intens

melakukan pemantauan langsung lini pelayanan publik sejak WFH mulai diterapkan Jumat pekan lalu. Hasto pun memberikan apresiasi tinggi terhadap integritas ASN di Kota Yogyakarta, karena mampu menjaga komitmennya dengan baik. Menurutnya, kekhawatiran banyak pihak soal kebijakan WFH akan disalahgunakan untuk memperpanjang libur akhir pekan sama sekali tidak terbukti di lingkungannya.

### CFD

Pemerintah DIY mulai Jumat kemarin juga resmi menerapkan Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau *car free day* (CFD) di kawasan Kompleks Kepatihan, mulai pukul 06.00 hingga 18.00 WIB. Hal ini sesuai Surat Edaran Sekretaris Daerah DIY Nomor B/400.7.17.3/7/BR.7 Tahun 2026 yang resmi ditetapkan pada 16 April 2026.

Dalam dokumen tersebut, Sekretaris Daerah DIY Ni Made Dwipanti Indrayanti menegaskan bahwa gerbang Kompleks Kepatihan pada hari Jumat hanya terbuka bagi kalangan terbatas. Kendaraan dinas Gubernur dan Wakil Gubernur serta tamu VIP dan VVIP tetap diizinkan melintas, begitu pula dengan kendaraan jabatan atau operasional berplat merah dalam situasi darurat atau kebutuhan tertentu.

Aspek kemanusiaan dan keselamatan juga tetap menjadi prioritas dengan diperbolehkannya mobil ambulans, pemadam kebakaran, serta kendaraan yang dikendarai oleh penyandang disabilitas untuk memasuki kawasan. Sementara itu, sejalan dengan semangat ramah lingkungan, kebijakan ini memberikan ruang seluas-luasnya bagi penggunaan moda transportasi tanpa emisi, mulai dari sepeda kayu dan sepeda listrik, hingga sepeda motor maupun mobil listrik. (**aka/han**)



**PELAYANAN PUBLIK** - Petugas melayani warga di Mal Pelayanan Publik, kompleks Balai Kota Yogyakarta, Jumat (17/4). Pemkot Yogya menjalankan program *work from home* (WFH) dan plafonisasi bahan bakar minyak kendaraan dinas dalam rangka efisiensi anggaran.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Walikota	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 19 Mei 2026

Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**

NIP. 19690723 199603 1 005